

PENGUATAN

KELEMBAGAAAN UPK

KAB GRESIK_2015

DI_BATU

JARINGAN KERJA EKSTERNAL

LEMBAGA

ORGANISASI

KEPEMIMPINAN

PROGRAM

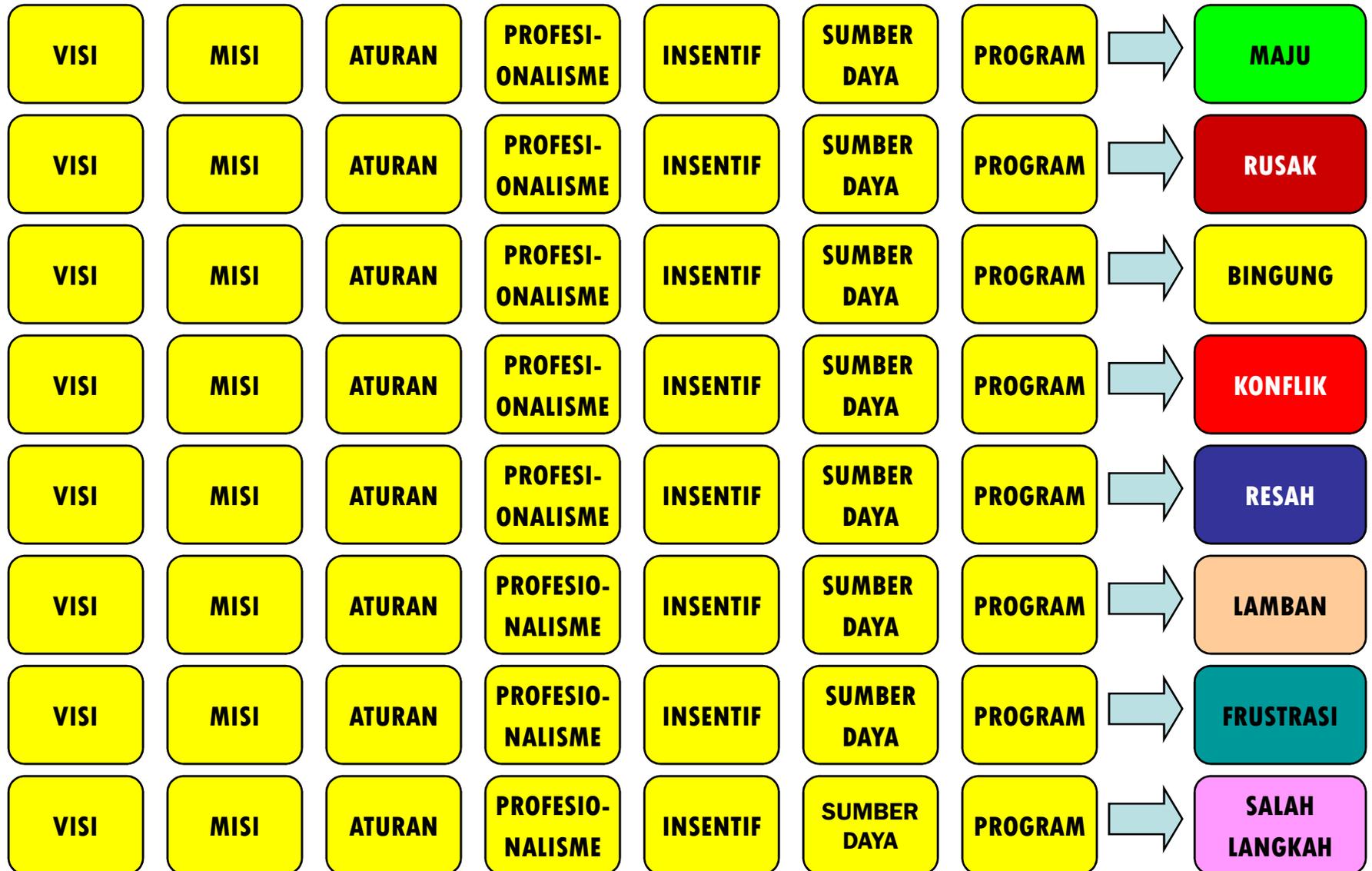
SISTEM KELOLA

SARANA PRASARANA

misi-VISI

SUMBERDAYA INTERNAL

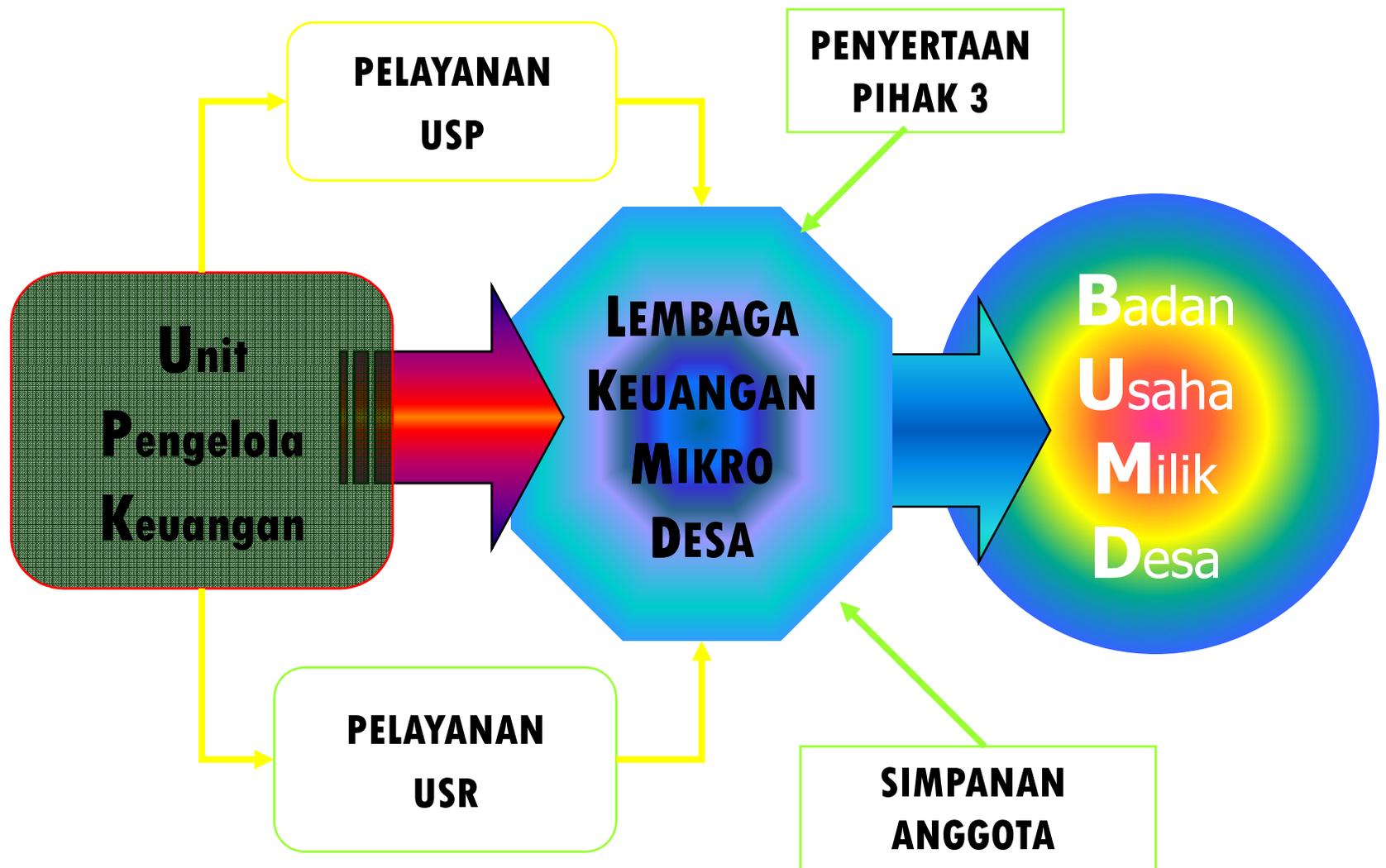
PENGEMBANGAN ORGANISASI



VISI-MISI UPK GERDU-TASKIN

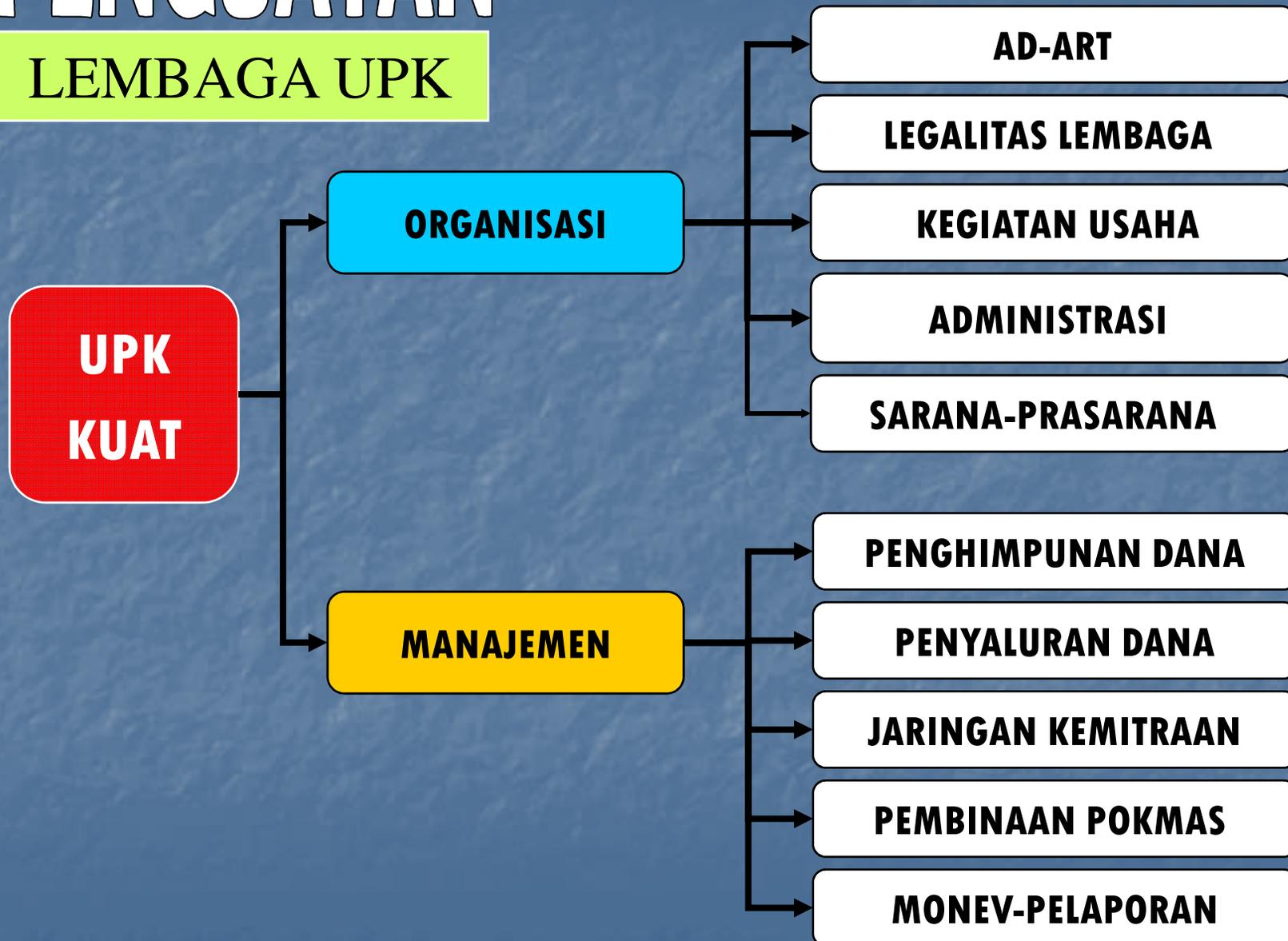
- VISI UPK DIORIENTASIKAN SEBAGAI INSTRUMEN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MISKIN DENGAN FOKUS:
 - LEMBAGA KEUANGAN MIKRO PERDESAAN (*MICRO FINANCE*).
 - MENGEMBANGKAN SISTEM KETERJAMINAN SOSIAL (*SOCIAL INSURANCE*).

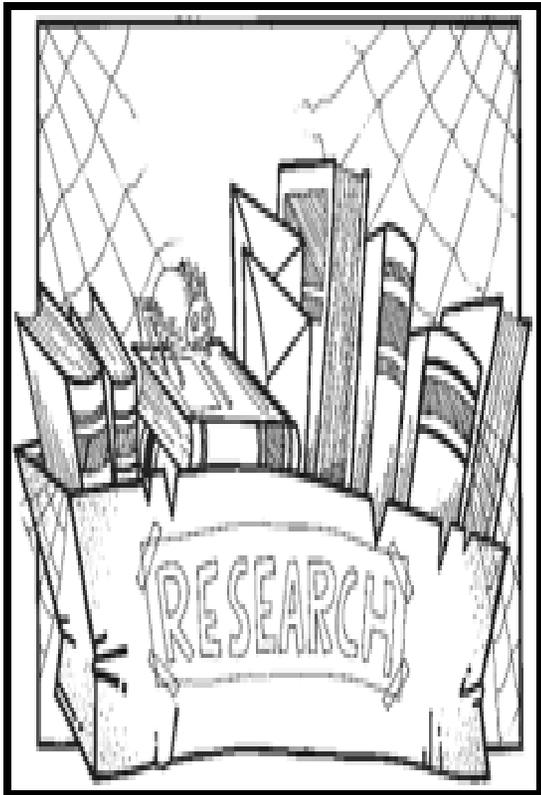
ARAH PENGEMBANGAN UPK



PENGUATAN

LEMBAGA UPK





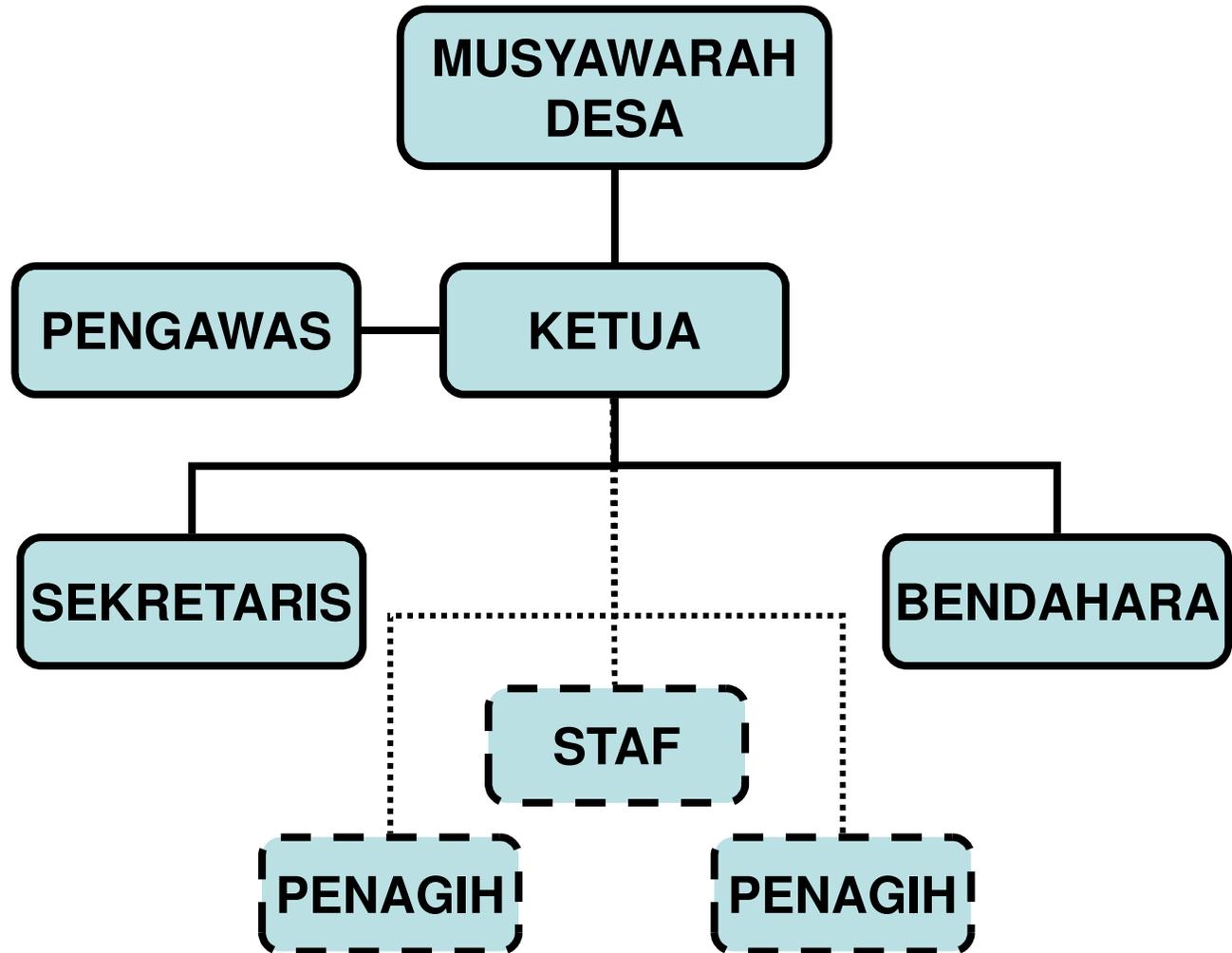
AD-ART UPK

POKOK-POKOK AD-ART

- **BENTUK LEMBAGA**
- **STATUS KEPEMILIKAN**
- **KEANGGOTAAN**
- **PENGEMBANGAN STRUKTUR ORGANISASI**
- **KEPENGURUSAN DAN MEKANISME PENETAPAN PENGURUS**
- **PERMODALAN**
- **ATURAN DASAR USAHA UPK**
- **PEMBAGIAN SHU**
- **TATA HUBUNGAN DENGAN PEMERINTAHAN DESA.**

R
A
C
H
K
U
R
T
O

ORG.UPK



KEPENGURUSAN

- Ditetapkan berdasarkan pertimbangan profesional dan kemampuan sesuai kebutuhan.
- Ada pembagian tugas secara jelas.
- Pemisahan antara pengurus, pengelola dan karyawan.
- Adanya sistem insentif dan honor secara profesional.
- Pengurus amanah, cakap mengambil keputusan dan bervisi.



LEGALITAS UPK

LEGALITAS UPK SBG BUMDES

- UPK sebagai Lembaga Keuangan Mikro Perdesaan.
- Koperasi dengan struktur organisasi terdiri dari Pengurus, Pengelola [Manajer beserta Karyawan] dan Badan Pengawas.
- Perusahaan Desa berbentuk Perseroan Terbatas [PT] dengan pengelola terdiri dari Komisaris dan Direksi.

BUMDES LKM

- Legalitas ditetapkan berdasarkan Perdes.
- Pengelola UPK dipilih melalui Musdes dan ditetapkan dalam SK Kades-Lurah.
- Dalam struktur organisasi UPK harus dibedakan antara fungsi Pengurus dengan Pengelola.
- Bisa dibentuk unit-unit usaha dalam lembaga UPK yang dikelola secara profesional.
- Masa kerja kepengurusan UPK 3-5 tahun, dan setelahnya bisa dipilih kembali.
- Modal UPK dari Modal sendiri, Modal Pinjaman dan Modal Penyertaan.
- Pengelola UPK terdiri dari unsur masyarakat yang dipandang jujur dan memiliki kemampuan teknis di bidangnya di luar Pemerintahan Desa.

UPK SBG PERUSAHAAN DESA

- **UPK SEBAGAI BADAN USAHA MILIK DESA DENGAN BADAN HUKUM PERUSAHAAN DESA DIBENTUK BERDASARKAN PERATURAN DESA (PERDES) YANG MENGACU KEPADA PERATURAN DAERAH (PERDA) TENTANG PEMBENTUKAN BUMDES.**
 - **PERDES DALAM HAL INI DITETAPKAN OLEH PEMERINTAH DESA BERSAMA DENGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD).**
-

BUMDES KOPERASI

- **BERDASARKAN UU 25/1992. APABILA UPK DIKEMBANGKAN SEBAGAI LEMBAGA KOPERASI, MAKA SELURUH RTM PENERIMA BANTUAN BISA DIPOSISIKAN SEBAGAI ANGGOTA KOPERASI DENGAN KEWAJIBAN MEMBAYAR SIMPANAN POKOK, SIMPANAN WAJIB DAN SIMPANAN SUKARELA.**
- **DANA GERDU-TASKIN DIPOSISIKAN SEBAGAI SIMPANAN POKOK KHUSUS PEMERINTAH DESA. BISA PULA DIATUR MODAL UPK DIGUNAKAN SEBAGAI SIMPANAN POKOK ANGGOTA, SEDANGKAN SISANYA MENJADI SIMPANAN KHUSUS DESA DALAM KOPERASI.**
- **KEKUASAAN TERTINGGI KOPERASI ADA PADA RAT. STRUKTUR KEPENGURUSAN TERDIRI DARI PENGURUS DAN PENGAWAS.**
- **KELEMBAGAAN KOPERASI DIATUR DALAM AD-ART YANG DISAHKAN MELALUI RAPAT ANGGOTA. KOPERASI YANG DIBENTUK BISA BERGERAK SBG KSP/KSU.**

BUMDES PERSEROAN TERBATAS

- **PEMENUHAN MODAL MINIMAL CUKUP BERAT DILAKUKAN UPK.**
- **IJIN SAMPAI KE MENTERI KEUANGAN DAN BANK INDONESIA.**
- **KUALIFIKASI DIREKTUR DAN PENGAWAS SULIT DIPENUHI OLEH UPK.**
- **PROSES PENGURUSAN IJIN MEMBUTUHKAN WAKTU YANG SANGAT LAMA.**

Status ASET UPK Sbg BUMDES

- **ASET UPK SELURUHNYA DIPINDAHBUKUKAN SBG ASET DESA DAN DICATAT SBG PENYERTAAN MODAL DESA SAAT PENDIRIAN BUMDES. CARA INI TIDAK MEMBERIKAN PELUANG BAGI RTM MEMPEROLEH HAK KEPEMILIKAN ASET UPK. NAMUN KEMANFAATAN OPTIMAL TERHADAP RTM BISA DITEMPUH DENGAN MENCANTUMKAN KETENTUAN BAHWA PORSI LABA BERSIH YANG DIPEROLEH BUMDES (MISAL 25 PERSEN) DIALOKASIKAN SEBAGAI DANA SOSIAL RTM.**
- **ASET UPK SEBAGIAN DIPINDAHBUKUKAN SBG ASET MILIK PEMERINTAH DESA DAN SEBAGIAN YANG LAIN DIALOKASIKAN SBG SAHAM YANG DIMILIKI OLEH MASING-MASING RTM DG PEMANFAATAN KEUNTUNGAN SECARA BERSAMA OLEH RTM DALAM BENTUK PENGEMBANGAN SISTEM JAMINAN SOSIAL.**

PEMBERDAYAAN RTM MELALUI BUMDES

- Fokus program Gerdu-Taskin memberdayakan RTM dengan kategori:
 - RTM Rentan (RTM-R), yakni masyarakat yang sangat miskin dan oleh sebab-sebab tertentu memiliki tingkat kerentanan dan resiko hidup yang tinggi (*the extreme poor*).
 - RTM Berpotensi (RTM-B) yakni masyarakat miskin yang memiliki kegiatan ekonomi (*economically active working poor*).
 - RTM Pekerja (RTM-P), yakni masyarakat yang berpenghasilan rendah (*lower incomes*) namun tidak memiliki usaha atau tidak berminat berwirausaha melainkan sekadar sebagai pekerja.
-

-
- Pendekatan yang dipakai dalam rangka penanggulangan kemiskinan tentu BERBEDA-BEDA.
 - Bagi RTM-R digunakan pendekatan langsung berupa pemberian hibah dalam bentuk santunan kebutuhan dasar secara *sustainable*. BUMDes mengembangkan sistem keterjaminan sosial dari penyisihan laba bersihnya untuk keperluan pemberian santunan sosial sesuai dengan kebutuhan RTM-R.
 - Bagi RTM-B BUMDes mengalokasikan pelayanan pinjaman permodalan dan fasilitasi pengembangan usaha melalui USP dan kemitraan USR.
 - Bagi RTM-P dialokasikan kebijakan membuka lapangan kerja guna mengatasi masalah pengangguran. BUMDes mengembangkan kemitraan untuk membuka investasi yang memberikan peluang usaha dan kesempatan kerja.
-



USAHA UPK

PENGEMBANGAN Usaha UPK

USP

KARAKTER NASABAH

SIS-DUR

PROFIT USAHA

ADM. KEUANGAN

USR

JENIS USAHA

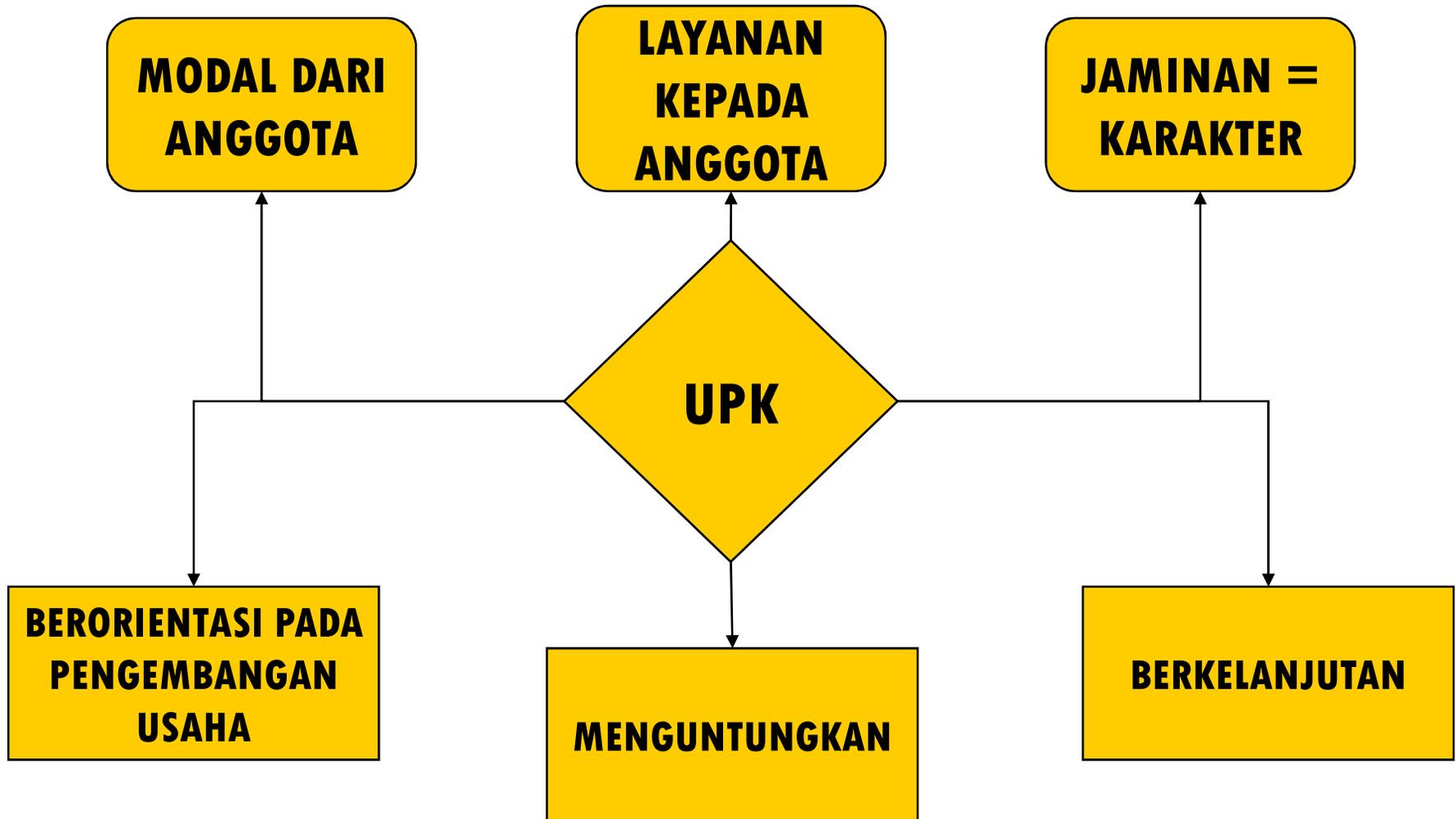
PROSPEK USAHA

EFEKTIFITAS
PENGELOLAAN

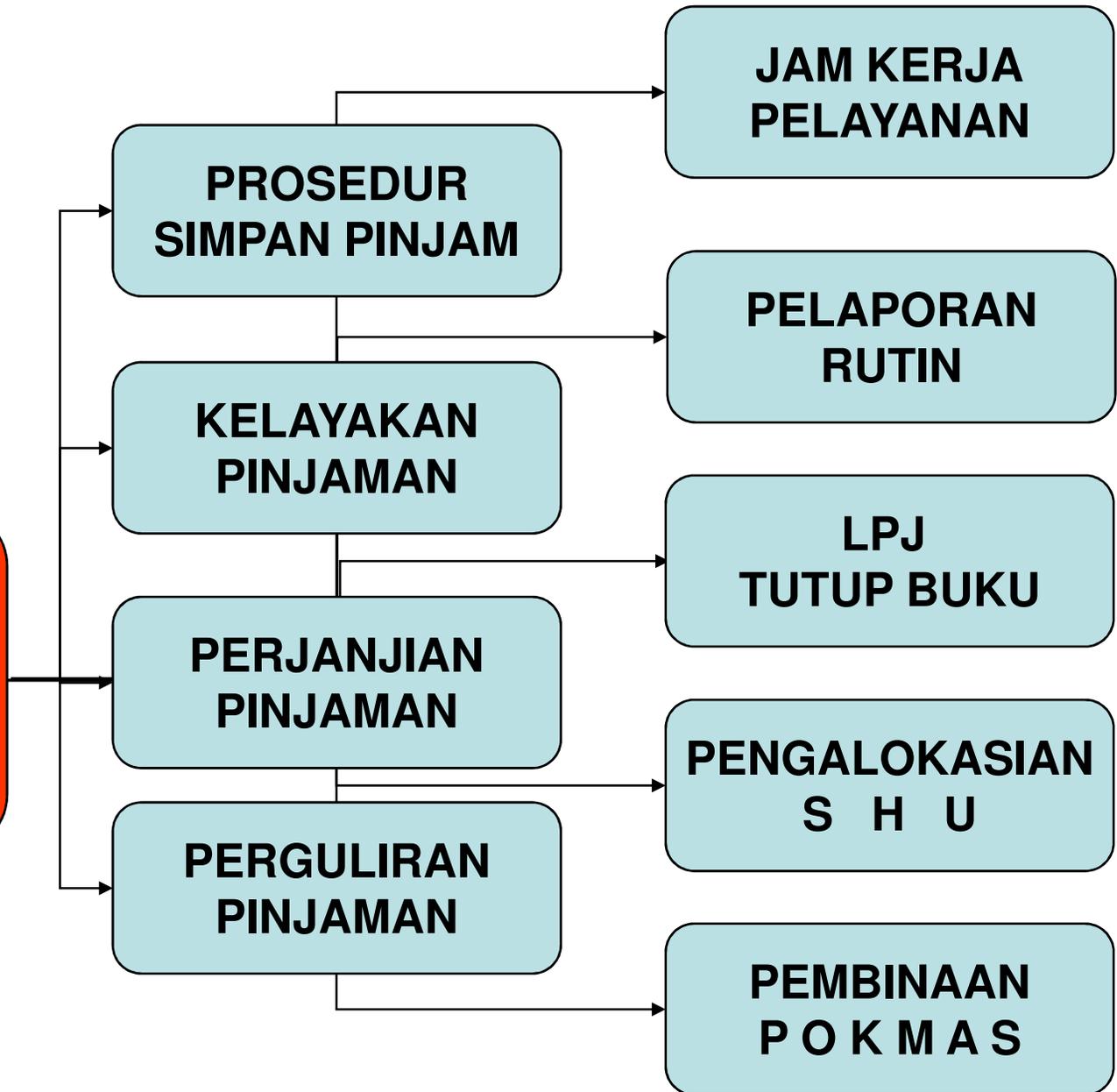
ADM. KEUANGAN

KUBE

PRINSIP KELOLA USP



**SIS-DUR
USP**



PERMASALAHAN USP

- ❑ **PINJAMAN DIBERIKAN KEPADA RTM UNTUK KEPENTINGAN KONSUMSI BUKAN UNTUK PENGEMBANGAN USAHA.**
- ❑ **CENDERUNG PEMERATAAN DENGAN ASUMSI SEMUA RTM-B MEMILIKI HAK UNTUK MEMPEROLEH DANA PINJAMAN SEHINGGA DIBAGI RATA KEPADA SEJUMLAH RTM-B.**
- ❑ **TERJADI KEMACETAN PINJAMAN SEBAB TIDAK DILAKUKAN ANALISIS KARAKTER PEMINJAM MAUPUN ANALISIS KELAYAKAN USAHA.**
- ❑ **TERJADI KEMACETAN PINJAMAN KARENA DANA DIANGGAP HIBAH.**
- ❑ **TERJADI KEMACETAN PINJAMAN KARENA PROTES KOLEKTIF ANGGOTA POKMAS.**
- ❑ **PEMINJAM INGIN MENDAPATKAN FASILITAS PINJAMAN TANPA BUNGA.**

PERMASALAHAN USR

- ❑ **PEMILIHAN JENIS USAHA BERESIKO DAN TIDAK PROSPEKTIF.**
- ❑ **POLA KEMITRAAN YANG DIPILIH MASIH BERUPA PENYERTAAN MODAL DENGAN MODEL PINJAMAN KOMERSIAL KEPADA PIHAK KETIGA.**
- ❑ **KEMAMPUAN PENGELOLAAN USAHA MASIH MINIM.**
- ❑ **PERJANJIAN KEMITRAAN USAHA BELUM DIATUR JELAS, SEHINGGA UPK RAWAN MENGALAMI KERUGIAN.**
- ❑ **PENGELOLAAN KEUANGAN BELUM JELAS.**



ADM-SARPRAS

UPK

administrasi keuangan

- **UPK harus mematuhi kaidah-kaidah dan prinsip dalam pembukuan, yaitu memenuhi unsur-unsur **kronologis** (berurutan sesuai dengan tanggal transaksi), **sistematis** (dapat dikelompokkan sesuai dengan posnya, seperti kelompok kekayaan, kelompok modal, kelompok hutang, kelompok pendapatan, kelompok biaya dan sebagainya), **informatif** (dapat dibaca dan dipahami secara umum dari kaca mata laporan keuangan) dan **auditable** (bisa dibuktikan dan dipertanggungjawabkan karena pencatatan yang dilakukan berdasarkan bukti-bukti transaksi).**
- **Buku-buku yang harus dipersiapkan tersebut adalah meliputi buku administrasi lembaga dan buku administrasi keuangan**

SARANA DAN PRASARANA

- **PEMERINTAHAN DESA BERKEWAJIBAN MENYEDIAKAN RUANGAN KHUSUS SEKRETARIAT DAN PELAYANAN USAHA UPK. SEKRETARIAT BISA PINJAM PAKAI ATAU DIBERIKAN SECARA PERMANEN.**
- **SEKRETARIAT MEMENUHI SYARAT:**
 - **LOKASI STRATEGIS**
 - **MEMILIKI RUANGAN DAN SARANA MEMADAI MISALNYA LUAS YANG CUKUP, AMAN, ADA SAMBUNGAN PLN ATAU BAHKAN TELEPON.**
 - **DILENGKAPI PAPAN NAMA, STRUKTUR ORGANISASI, STEMPEL, DAN INVENTARIS KANTOR YANG MEMADAI.**
- **KANTOR PELAYANAN UPK SEBAIKNYA BERADA DI SEKITAR PASAR ATAU LOKASI USAHA YANG STRATEGIS DI DESA.**



PENGHIMPUNAN DANA

PENGHIMPUNAN DANA

JENIS	SUMBER DANA	WAKTU	SIFAT
SIMPANAN	TBGN PINJAMAN	BULANAN ATAU SESUAI KETENTUAN	MENAMBAH DANA MEMBERIKAN JASA/BAGI HASIL
	TBGN BERJANGKA		
	TBGN UPK		
HUTANG	HTG PD BANK	SESUAI PERJANJIAN	MENAMBAH DANA MEMBERIKAN BIAYA
	HTG PD PIHAK LAIN		
MODAL	SIMPAN POKOK	JANGKA PANJANG	MEMBENTUK MODAL BUKTI KEPEMILIKAN.
	SIMPAN WAJIB		
	DANA PENYERTAAN		
	DANA LAIN-LAIN		

PERLUASAN SEGMENT PELAYANAN

- Nasabah UPK mulai diperluas dengan melayani non-RTM, dari luar desa, dengan sistem jaminan dan bagi hasil.
- Sistem pelayanan pinjaman bisa secara berkelompok maupun perorangan.
- Pinjaman secara berkelompok sebaiknya berdasarkan kesamaan jenis usaha, sehingga mudah memberikan pembinaan.
- Harus dibuat ketentuan dimana anggota memperoleh kemanfaatan optimal dr kegiatan usaha UPK shg merasa memiliki.



PENYALURAN DANA

PENYALURAN DANA

- PENGELOLAAN PINJAMAN SECARA OPTIMAL MENENTUKAN KELANGSUNGAN HIDUP UPK. PENYALURAN PINJAMAN BERAKIBAT PADA PERTAMBAHNYA HARTA TETAP MAUPUN BERKURANGNYA MODAL/KERUGIAN.
- DANA UPK BAIK YANG BERASAL DARI SIMPANAN, TABUNGAN , MAUPUN MODAL SELAYAKNYA DISALURKAN UNTUK KEPERLUAN PRODUKTIF DENGAN MEMPERHATIKAN KAIDAH-KAIDAH:
 - ▶ AMAN
 - ▶ LANCAR
 - ▶ MENGHASILKAN

**PENGUNAAN
DANA UPK**

PRODUKTIF

investasi

**NON
PRODUKTIF**

inven-
taris

SOSIAL

diklat

**PEMENUHAN
KEWAJIBAN**

pinjaman
dana
cadangan



JARINGAN KEMITRAAN

KEMITRAAN DAN JARINGAN

- **JARINGAN KERJASAMA ANTAR UPK SEBAGAI WADAH KONSOLIDASI, KORDINASI DAN KONSULTASI MAUPUN PENGEMBANGAN KEMITRAAN USAHA.**
- **Dikembangkan kemitraan baik berbasis produk, manajerial maupun pemasaran.**
- **Perlu dibentuk Jaringan Kelembagaan maupun Usaha UPK dalam bentuk:**
- **Forum UPK sebagai jaringan:**
 - **Pengembangan Permodalan**
 - **Pengembangan Potensi Unggulan**
 - **Pemasaran Usaha**



PEMBINAAN POKMAS

PEMBINAAN POKMAS

- PERMODALAN
- BIMBINGAN USAHA
- BANTUAN TEKNIS
MANAJEMEN, PRODUKSI,
PEMASARAN
- MEDIASI DAN KEMITRAAN
USAHA.



PELAYANAN NASABAHUPK

- **Sebelum Transaksi Usaha**

Prosedur Pelayanan sederhana namun memberikan jaminan keamanan usaha.

- **Selama Transaksi Usaha**

Dibangun komunikasi dengan mitra usaha dan pembinaan nasabah.

- **Paska Transaksi Usaha**

Dilakukan evaluasi pada karakter nasabah, keberhasilan maupun kendala kemitraan usaha.



MONEY PELAPORAN

MONEV-PELAPORAN

1. PEMANTAUAN
 - Kemajuan usaha
 - Pelaksanaan program
 - Masalah yang terjadi

2. PEMANTAUAN KINERJA KEUANGAN
 - Struktur modal
 - Efisiensi
 - Tingkat keuntungan
 - Tingkat kemacetan pinjaman

3. PELAPORAN DAN PEMBINAAN

TUGAS DISKUSI

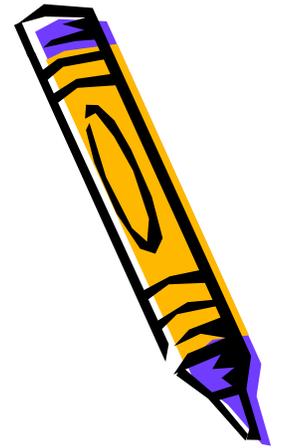
- Diskusikan agenda Fasilitasi Penguatan Kelembagaan UPK.
- Hasil disusun dalam bentuk Tabel.
- Masing-Masing Kelompok Presentasi.
- Menunjuk Tim Perumus Untuk Menyusun Hasil Pleno.

TABEL AGENDA FASILITASI Penguatan Kelembagaan UPK

AGENDA	KEGIATAN	SASARAN
PENYEMPURNAAN AD-ART		
LEGALITAS LEMBAGA		
PENGELOLAAN USAHA		
ADMINISTRASI, SARANA DAN PRASARANA		

AGENDA	KEGIATAN	SASARAN
PENGHIMPUNAN DANA	<ul style="list-style-type: none">- Musdes- Penyempurnaan aturan- Penyiapan perangkat admt-	<ul style="list-style-type: none">-UPK- Desa
PENYALURAN DANA		
JARINGAN KEMITRAAN		
PEMBINAAN POKMAS		
MONEV-PELAPORAN		

UPK



Terima Kasih

